



**TATA CARA
PENGELOLAAN ANGGARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP)
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Departemen Pendidikan Nasional
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. H Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telpon (024) 7460015 Facsimile (024) 7460018

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	469/Ks/penlit/861
Tgl.	28-4-86

KATA PENGANTAR

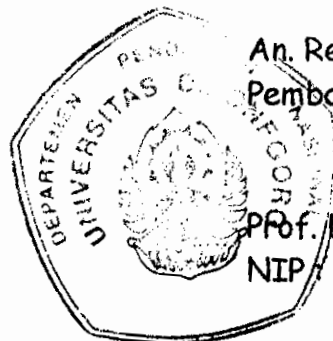
Pengelolaan dalam bidang administrasi keuangan memerlukan kecermatan, ketepatan didalam proses perencanaan pengusulan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Untuk itu diperlukan pemahaman yang cukup tentang dasar hukum pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tugas dan kewajiban serta mekanisme, penyusunan dan pengusulan DUKS serta prosedur penyetoran, pencairan dan pertanggungjawaban PNBP /DIKS

Berkenaan dengan maksud dan tujuan diatas, maka disusunlah *Buku Tata Cara Pengelolaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Diponegoro*.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan

Semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran PNBP dimasa mendatang.

Semarang, Februari 2004



An. Rektor
Pembantu Rektor II

Prof. Dr. Ir. YS Darmanto, MSc
NIP. 130 675 347

DAFTAR ISI

HALAMAN

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Dasar Hukum Pengelolaan PNBP /DIKS	2
BAB III	Beberapa Pengertian Umum	5
BAB IV	Struktur Organisasi Pengelola PNBP /DIKS	7
BAB V	Tugas dan kewajiban Pengelola PNBP/ DIKS	8
BAB VI	Jenis /macam PNBP	13
BAB VII	Mekanisme Penyusunan, pengusulan DUKS dan Pengesahan PNBP/DIKS	14
BAB VIII	Mekanisme penyetoran dan pencairan dana PNBP/DIKS	16
BAB IX	Revisi Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS)	18
BAB X	Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan dana PNBP/DIKS	19
BAB XI	Mekanisme Pengawasan	20
Penutup		22

Lampiran

- SE Dirjen Dikti No. 3008/D/B/2003 tanggal 17 Oktober 2003 perihal "Pelaksanaan Pengelolaan PNBP Perguruan Tinggi Negeri"

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997 tentang jenis dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka terjadi perubahan tata cara pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan PNBP di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri

Undang-undang dan peraturan Pemerintah yang mendasari pengelolaan PNBP tersebut diatas telah diaplikasikan kedalam keputusan Menteri Keuangan RI No. 115 /KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-63/A/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Perguruan Tinggi yang harus diikuti oleh seluruh Pengelola Dana PNBP di Perguruan Tinggi dengan beberapa hal yang dapat digaris bawahi, antara lain sebagai berikut :

1. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara
2. Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN
3. Untuk mengajukan Surat Permintaan Pengeluaran (SP2) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dilampiri dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) untuk penggunaan 1 (satu) bulan